

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam perkembangannya sebuah Negara terus melakukan pengembangan dan pembenahan dan pembangunan dalam penataan dan pembagian kekuasaan. Semuanya dalam rangka pemaksimalan pembangunan dan efektifitas Demokrasi serta percepatan pengembangan. Menurut Conyers (Muluk, 2009, hal.3) bahwa pada abad ke 20 banyak Negara bahkan melakukan perubahan struktur menjadi Desentralisasi., hal ini juga menandakan bahwa pembangunan dalam perkembangan tatanan Internasional. Dimana pelimpahan kewenangan kepada pemerintah otonom daerah adalah keinginan pemerataan pembangunan sebuah Negara. Di Indonesia desentralisasi termaktub dalam Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang mana juga menggantikan Undang Undang Sebelumnya yakni Undang Undang Nomor 32 tahun 2004.

Dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2014 bab IV secara eksplisit menjelaskan tentang pembagian kerja. Dalam pasal 9 mengupas tentang pembagian urusan dalam pemerintahan yang mana ada urusan yang dapat dieksklusi dan ada yang tidak. Adapun yang dapat dieksklusi adalah urusan Konkuren yang juga menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah menjalankan

kewenangannya. Selanjutnya kewenangan konkuren tersebut dijelaskan kembali pada pasal 11 dalam urusan konkuren pilihan adalah perdagangan, perindustrian, lingkungan olah raga dll.

Dalam rangka mengembangkan pembangunan ekonomi di era Industri maka urusan konkuren terkait Pengembangan industri perlu dikembangkan. Selaras dengan hal tersebut munculnya konsep Liberalisme sebagai tantangan bagi Negara berkembang dalam pembangunan yang meyakini kebebasan pasar dalam berkompetisi dan menentukan harga serta meyakini bahwa setiap individu berhak bersaing dan mengembangkan usahanya sendiri semakin menguatkan dominasi Industrialisasi di dunia. Seiring dengan menguatnya pasar dan kepercayaan pada Invisible Hand yang secara maha kuasa mengatur naik turunnya harga melalui Konsep *Equilibrium Point* atau oleh Goerge Soros (2015: 67) disebut sebagai titik temu antara permintaan dan pasokan. Terlebih lagi pasar eropa yang terbatas menciptakan pemikiran tentang invansi pangsa pasar dunia, melalui teori Modernisme yang memiliki konsep *Devision of labour* Negara dunia pertama mulai melakukan pembagian kerja dimana Negara berkembang yang cenderung memiliki iklim tropis bertugas untuk memproduksi bahan bahan mentah guna di Ekspor kepada Negara Maju, lalu Negara Maju dengan basis Industrinya mengolah bahan bahan yang didapatkan dari Negara berkembang dengan harga relative murah untuk

dijadikan komoditas manufaktur sehingga layak untuk di jual kembali pada Negara Negara berkembang. Perdagangan yang menciptakan deficit neraca pada Negara berkembang ini terus menerus menciptakan penindasan ekonomi.

Berbagai ilmuan mengemukakan konsep pembangunan pada Negara berkembang guna memutus lingkaran yang merugikan ini, diantaranya ada teori Subtitusi Impor yang dikemukakan oleh Paul Prebisch, dalam bukunya arief Budiman (1995: 52) dikutip konsep subtitusi impor yang berfokus pada pemberian insentif pada Industri Industri kecil yang memiliki potensi berkembang sehingga perlahan mulai menggantikan komoditi manufaktur yang awalnya hanya diimpor dari Negara maju sehingga dapat menutup deficit neraca perdagangan. Konsep tersebut kemudia diterjemahkan oleh banyak Negara Berkembang mulai dari Brazil, Gana, Meksiko Hingga Indonesia.

Di Indonesiakonsep subtitusi Impor lebih dikenal dengan pemberdayaan IKM. Kekuatan IKM dan UMKM di Indonesia sendiri terlihat dari laporan Menteri Koprasi dan data BPS tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pada tahun 2018 menyerap tenaga kerja hingga mencapai 116,63 juta jiwa atau 97% dari 100% masyarakat tenaga kerja selain itu IKM juga memiliki pasar Industri yang mencapai nilai 99.9% pasar Industri Indonesia. hal ini kemudian diregulasikan dalam Undang Undang Nomor 9 tahun

1995 tentang usaha Kecil, dalam regulasi tersebut pemerintah Ingin membangun Industri yang bias dikelola oleh Masyarakat. Kemudian diperbaharui melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang secara Eksplisit mengatut definisi dan pengkategorian UKM dan IKM. UMKM dan IKM kemudian menjadi program yang secara intens dikerjakan. Pemerintah notonom dibawah pemerintah pusat pun seiring waktu mulai menguatkan pendampingan IKM dan UMKM. Di jawa Timur menurut data dinas Koperasi peningkatan Jumlah IKM dari tahun 2017 hingga 2018 mencapai 3%. Seperti kabupaten yang lain di jawa timur, Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan jumlah UMKM, dalam laporan Sensus Ekonomi dan Sutas tahun 2018 jumlah IKM di Kabupaten Pasuruan mencapai 362.230.

Maka pada tahun 2017 Bupati pasuruan Irsyad yusuf melalui Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2017 meregulasikan Program Satrya Emas (Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat) mengupayakan pendampingan dan pemberdayaan IKM di Kabupaten Pasuruan. Tercatat sejak pembukaan pendaftaran Satrya Emas sudah ada 240 IKM yang terdaftar sebagai anggota Satrya Emas. Tapi meski telah berjalan sejak 2017 lalu program pengembangan IKM ini hanya dapat meningkatkan jumlah Unit Usaha dan belum mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan produktivitas yang meningkat. Hal tersebut terlihat dari Laporan Dinas Koperasi dan UMKM yang per tahun mencapai penambahan

Jumlah UKM 200 Unit, sedang pengangguran terbuka per tahun 2018 meningkat 1,14 menjadi 6,11%. Terlebih jika melihat karakteristik IKM dalam Nomor 20 tahun 2008 bahwa per UKM bisa menampung minimal 5 pekerja maka terang seharusnya peningkatan signifikan jumlah Unit UKM berdampak nyata bagi peningkatan Jumlah Angkatan Kerja. Terlebih lagi (Laporan BPS Kab. Pasuruan, 2019 Hal.3-7). Dalam laporan data yang sama tercatat PDRB (pendapatan Regional Domestik Bruto) mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang pada posisi Rp. 124.979.824,9 juta menjadi Rp.135.969.358,7 pada Tahun 2018. Kenaikan ini berasal dari naiknya produksi dan pendapatan dari tiga sector utama Yakni Industri manufacturing, Industri besar dan Bisnis Otomotif. Pada saat yang sama Menurut laporan Dinas Koperasi di tahun 2018 kenaikan jumlah IKM mencapai angka 255.533, maka rata rata kenaikan pertahun bias mencapai 2000 Unit. Terang bila terjadi stagnan dalam produktifitas dalam UKM dan IKM dengan jumlah yang sedemikian besar (Laporan Dinas Koperasi Tahun 2018). Dalam literature lain Harry (2016: 5) menyatakan bahwa UMKM di Pasuruan masih belum mampu bersaing dalam kualitas produk dan kurang mampu inovatif serta Program Satrya Emas masih memberi pembinaan pada beberapa UMKM yang idak secara menyeluruh. pemberdayaan IKM yang masih kurang maksimal ini terjadi karena banyak faktor, secara garis besar belum mempunya

UKM bersaing secara kualitas dikarenakan Kurang Kontrol, Kesulitan Modal dan kelemahan manajerial pelaku UMKM, hal ini jelas menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat sasaran.

Hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk meneliti terkait Program tersebut. Oleh karenanya Penulis mencetuskan Judul “ AnalisisProgram Satrya Emas perspektif *Human Centered*”. William B. Rouse (2007: 5) menyebutkan konsep tentang *People Centered* adalah sebuah desain pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat baik individu maupun kolektif dimana mengupayakan tercakupnya semua kepentingan *Stakeholder*. Melalui Konsep *Human Centered Design* ini nantinya akan menjadi pisau analisis guna menguji Program Satrya Emas dalam Pemberdayaan yang pada hasil akhirnya dapat diketahui bagaimana keberhasilan Program Satrya Emas dalam membangun Industri masyarakat dengan pendekatan *Human Centered Design* serta bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan program pemerintah tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, muncul rumusan masalah.

1. Bagaimana Program satrya Emas dalam membangun kemandirian ekonomi dalam perspektif *Human Centered* ?
2. Bagaimana Tingkat Partisipasi dalam Program Satrya Emas?

### **1.3. Tujuan**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah

1. mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan Programs Satrya Emas dalam upayanya melakukan Pembangunan Kemandirian Ekonomi dalam perspektif *Human Centered* di Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Satria Emas.

### **1.4. Manfaat**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya di bidang ilmu administrasi publik terkait Pembangunan kemandirian ekonomi berbasis *Human Centered* (William B. Rouse, 2007: 5), serta bidang ekonomi politik Konsep Subtitusi Impor, (Paul Prebisch, 1995: 52).

#### 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Sebagai bahan informasi untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menelaah serta mendalami masalah diatas. Sedangkan bagi mahasiswa administrasi publik dapat menjadi sebuah pemahaman tentang Pembangunan dan ekonomi politik. Serta bagi masyarakat secara umum ini bias mnenjadi informasi sekaligus menjadi refleksi bahwa masyarakat bisa menciptakan industri secara Independen dan infoprmasi tentang Program Satrya Emas. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan bisa dijadikan sebagai refleksi atas Program yang telah berjalan 3 tahun dan dimungkinkan melahirkan rekomendasi rekomendasi Inovasi atas pemberdayaan Industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Pasuruan.